KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Telusuri celah regulasi: komisi III usul bentuk pansus penyadapan
Tanggal : Rabu, 11 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Telusuri Celah Regulasi

Komisi III Usul Bentuk Pansus Penyadapan

ANGGOTA Komisi III DPR Abdullah mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan menyusul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, pengusaha, tokoh lembaga swadaya masyarakat, dan media. Kasus yang diungkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, menyasar ribuan nomor telepon.

Abdullah menilai, pembentukan Pansus guna mengungkap kasus penyadapan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Keterlibatan Pansus DPR diharapkan mengungkap siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme penyadapan itu dilakukan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa aktivitas itu dijalankan.

Dia bilang, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa. Karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Pengungkapannya harus terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. "Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penanganannya," ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Selanjutnya, kata Abdullah, pembentukan Pansus juga untuk memastikan pengawasan politik dan kelembagaan terhadap proses penanganan kasus itu. Karena dugaan penyadapan menyasar pejabat tinggi negara dan berbagai kalangan masyarakat. Sehingga berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi keamanan komunikasi, perlindungan data pribadi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Proses hukum saja, sambungnya, tidak cukup menjawab seluruh persoalan yang muncul. Pansus DPR perlu menelusuri celah regulasi, lemahnya pengawasan, serta penyalahgunaan perangkat dan kewenangan penyadapan. Pansus wajib memastikan penyadapan itu untuk negara atau kepentingan pribadi dan kelompok yang melanggar hukum, serta membedakan penyadapan sah dan ilegal.

Dia berharap, Pansus diisi anggota DPR lintas fraksi dan lintas komisi secara proporsional agar pengawasan berjalan objektif, independen, dan komprehensif. Keterlibatan lintas komisi diperlukan karena persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. "Persoalan ini juga menyangkut keamanan negara, komunikasi, teknologi informasi, dan perlindungan hak masyarakat," terangnya.

Dia juga mendorong lingkup Pansus mencakup pengungkapan jumlah pasti korban dan sasaran penyadapan. Penelusuran perlu menyasar pihak yang menginisiasi, memerintahkan, membiayai, dan menjalankan penyadapan, serta penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS). Mulai dari sumber pengadaan, kepemilikan, akses penggunaan, hingga pihak pengendali sistem itu. ■ PYB